DUKUNG PENERAPAN GIRATORI KAWASAN MALIOBORO

Normalisasi Jalan Dilakukan Bertahap

YOGYA (KR) - Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro berupa giratori dipastikan akan dilakukan secara permanen. Kendati demikian, normalisasi jalan untuk mendukung langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Hari Setyawacana, mengungkapkan salah satu normalisasi yang dilakukan ialah pembongkaran devider di tiga ruas jalan yakni Jalan Suryotomo, Jalan Pasar Kembang dan Jlagran. "Sudah kami petakan, tapi itu nanti bertahap. Tahap pertama nanti di Jalan Suryotomo dulu karena itu cukup panjang. Akan coba kami usulkan melalui APBD perubahan," jelasnya usai melakukan pemantauan lokasi, Jumat (21/5).

Selain itu keberadaan pohon perindang yang tumbuh di sela-sela devider otomatis akan turut dipindah. Hanya kewenangannya diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya. Harapannya pemindahan pohon perindang juga beriringan dengan pembongkaran devider di Jalan Suryotomo.

Hari mengaku, setelah devider berhasil dibongkar akan ditindaklanjuti dengan penataan penerangan jalan umum (PJU). Titik lokasi PJU pun tengah dipetakan agar sesuai dengan kebutuhan. "Sebenarnya masih ada pekerjaan untuk normalisasi simpang di Ngabean. Tapi itu juga nanti, belum tahun ini," imbuhnya.

Senada diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Agus Arif Nugroho yang menyebut butuh tahapan untuk normalisasi jalan kawasan Malioboro untuk mendukung penerapan giratori secara permanen. Hal ini karena kemampuan anggaran daerah harus disesuaikan dengan penanganan Covid-19 yang masih menjadi prioritas utama. Meski dilakukan bertahap namun seluruhnya terukur dan terintegrasi dengan tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Agus mengaku, kebutuhan saat ini hanya bersifat teknis. Selain pemindahan pohon perindang, pembongkaran devider serta normalisasi simpang di Ngabean, perlu juga ada tambahan rambu bagi pengendara. Terutama untuk memberikan informasi berupa lajur untuk menuju kawasan tertentu. "Misalnya lajur menuju ke parkir Abu Bakar Ali atau masuk ke Jalan Pasar Kembang. Kemudian sejumlah traffic light pada momen tertentu durasinya juga perlu diatur," urainya.

Terkait penerapan giratori, menurutnya masyarakat sudah bisa menilai sendiri jika dibandingkan dengan arus sebelumnya. Terutama kondisi saat ini yang sudah mulai terlihat lancar meski berada di jam sibuk. Kawasan Malioboro sebagai pusat aktivitas masyarakat membutuhkan penanganan komprehensif dari aspek manajemen lalu lintas. Hal ini supaya wisatawan maupun masyarakat yang beraktivitas merasakan kenyamanan. **(Dhi)** -f

KR-Istimewa

Pemantauan rekayasa lalu lintas giratori kawasan Malioboro, Jumat (21/5).

PEMDA DIY SUSUN PERGUB

PPDB Tetap Menggunakan Sistem Zonasi

YOGYA (KR) - Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022. Dalam seleksi kali ini Disdikpora DIY akan memasukkan hasil ujian Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) sebagai salah satu indikator dalam seleksi PPDB. Namun untuk detailnya seperti apa, saat ini Disdikpora DIY masih melakukan koordinasi dengan kementerian terkait berkaitan dengan hal itu.

"PPDB tahun ini tetap menggunakan sistem zonasi. Namun ketika kuota dalam sekolah membludak atau melebihi daya tampung maka akan digunakan seleksi dari hasil nilai ASPD. Saat ini Disdikpora DIY sedang menyusun atau mematangkan Pergub tentang PPDB. Kemarin ada ide dari Disdikpora DIY hasil ASPD dimanfaatkan sebagai salah satu indikator seleksi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di ruang kerjanya, Jumat (21/5).

Baskara Aji mengungkapkan, kendati nilai dari ASPD tidak mempengaruhi kelulusan siswa, tapi ASPD sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemetaan kualitas sekolah. Sehingga sekolah bisa mengetahui sejauhmana capaian pembelajaran siswa dan bisa melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang kemungkinan masih ditemukan. Selain itu karena PPDB masih dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, rencananya akan dilaksanakan secara online. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Meski begitu seandainya karena keterbatasan yang dimiliki atau ada kendala jaringan, sehingga terpaksa calon siswa harus datang ke sekolah, harus dibantu dan dilayani dengan baik.

"Mungkin ada beberapa yang terpaksa harus offline. Orang yang belum paham betul teknologi informasi untuk konsultasi harus datang, diperbolehkan dan harus dilayani dengan baik," ungkapnya. **(Ria)-f**

KR-Riyana Ekawati

Drs K Baskara Aji

Komisi C Akan Awasi Peruntukkan Hotel Mutiara

YOGYA (KR) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pembelian Hotel Mutiara yang disinyalir ada cacat prosedur. Mengenai hal ini Komisi C DPRD DIY memastikan bakal memantau peruntukkan Hotel Mutiara, agar tidak difungsikan lagi sebagai hotel.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Setiadi dalam jumpa pers, Jumat (21/5). Arif menegaskan, jika sampai Hotel Mutiara tetap difungsikan sebagai hotel termasuk pelanggaran.

Arif menjelaskan, pembelian Hotel Mutiara dengan dana Rp 170 miliar termasuk cacat prosedur. Ada tiga aturan yang tidak sesuai dalam proses pembelian tersebut, Perpres Nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa, PP Nomor 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13/2006 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 21/2011 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Persoalan pembelian Hotel Mutiara oleh Dinas Kebudayaan memang bukan menjadi ranah kami. Namun merunut laporan BPK, kami ingin meminta jawaban dari eksekutif terkait hal itu dan rekomendasi apa yang akan disampaikan," katanya.

Secara spesifik, Arif mencoba mengurai tentang persoalan pembelian Hotel Mutiara tidak akan membentuk atau menggunakan panitia khusus. Tetapi melalui alat kelengkapan fungsi yang dimiliki komisi. Ini dilakukan agar tidak terjadi friksi di tubuh dewan sendiri.

Saat meminta klarifikasi, Komisi C akan fokus pada soal perencanaan dan peruntukannya ke depan. Pasalnya tanpa adanya perencanaan, kemungkinan besar aset yang dibeli dengan uang rakyat ini akan mangkrak lama dengan optimalisasi rendah.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Lilik Syaiful Ahmad mengaku pihaknya secara khusus akan menyoroti aturan pengeluaran anggaran mengenai barang dan jasa. Karena pembelian Hotel Mutiara dilakukan sebelum dilakukan appraisal dan saat itu dana pembelian belum ada. **(Awh/Bro)-f**

KLASTER DI WILAYAH WIROBRAJAN TERKENDALI

Ditemukan 7 Kasus dari 30 Tes PCR

YOGYA (KR) - Hasil penelusuran dari sebuah klaster di salah satu RT wilayah Wirobrajan kembali menemukan kasus baru. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan yakni tujuh kasus baru dari 30 tes PCR yang sudah keluar hasilnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut terakhir ada 39 warga yang ditindaklanjuti dengan tes PCR. "Dari jumlah itu 30 warga sudah keluar hasilnya yakni tujuh orang positif. Kemudian masih ada sembilan warga lagi yang mudah-mudahan hasilnya semua negatif," jelasnya, Jumat (21/5).

Dengan tambahan tersebut maka jumlah total kasus positif dari klaster tersebut mencapai 37 orang, dengan satu orang meninggal dunia. Sebagian besar yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit juga sudah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Kendati demikian, isolasi mandiri masih direkomendasikan sampai masa inkubasinya selesai.

Menurut Heroe, sejak awal menemukan kasus di salah satu RT di Wirobrajan pihaknya intensif melakukan upaya tracing. Saat ini tracing juga sudah dihentikan karena tidak lagi menemukan kontak erat dari pasien positif. Harapannya klaster di Wirobrajan tersebut sudah dapat dikendalikan. "Semua tambahan baru yang hasilnya keluar, yakni tujuh orang itu kondisinya tanpa gejala. Sudah tidak kami temukan lagi kontak erat. Tetapi jika nanti ada tambahan baru dan menemukan kontak erat, tracing bisa kami gencarkan kembali. Mudah-mudahan memang sudah bisa terkendali," imbuhnya.

Terkait kepastian berakhirnya pembatasan lokal di wilayah tersebut, Heroe menyerahkan sepenuhnya ke wilayah. Apalagi sebagian besar sudah menyelesaikan masa isolasi mandiri. Hanya, jika zona RT masih berstatus merah sesuai PPKM mikro, maka pengetatan aktivitas masih diberlakukan.

Oleh karena itu pihaknya tetap meminta posko PPKM mikro di tiap RT atau RW tetap mengintensifkan pengawasan. Kendati masa penyekatan pemudik sudah berakhir, namun jika ada pendatang yang masuk ke wilayah tetap harus dilaporkan. Tidak menutup kemungkinan, ada sejumlah warga yang memilih mudik setelah berakhirnya masa penyekatan di perbatasan. **(Dhi)-f**

Dewan Terapkan Indonesia Raya Bergema

YOGYA (KR) - Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza mulai diperdengarkan pukul 10.00 WIB di setiap hari kerja di DPRD DIY, mulai Jumat (21/5). Hal itu merupakan implementasi Gerakan Indonesia Raya Bergema. Gerakan tersebut adalah sebuah bentuk kampanye berkelanjutan untuk menggelorakan nasionalisme. Adapun pelaksanaannya telah diatur melalui Surat Edaran Gubernur DIY No 29/SE/V/2021.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur DIY untuk memutar lagu Indonesia Raya di ruang publik. Ini adalah contoh yang baik untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," kata Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai, Jumat (21/5).

Pemutaran Lagu Kebangsaan di DPRD DIY kemarin dilakukan setelah rapat Konsultasi Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Komisi DPRD DIY. Semua yang hadir mendengarkan dengan khidmat.

Menurut Anton, gerakan ini diharapkan mampu menggelorakan spirit keindonesiaan, termasuk di kalangan generasi milenial. Dengan demikian akan terpupuk kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. **(Bro)-f**

Syawalan Jadikan Insan Bereputasi

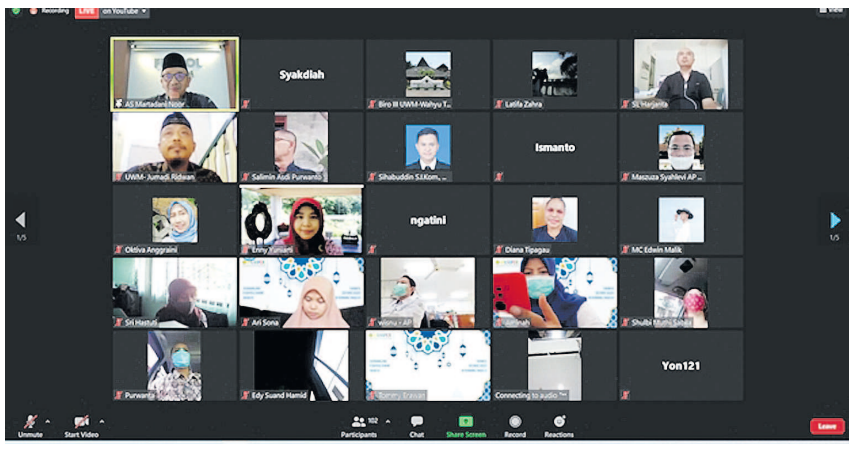

KR-Istimewa

Syawalan keluarga besar Fisipol UWM secara daring.

YOGYA (KR) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Widya Mataram (UWM) menggelar syawalan dengan tajuk '2 Tahun Covid-19, Refleksi Diri sebagai Jalan Menjadi Insan Bereputasi'. Syawalan virtual melibatkan sivitas akademika Fisipol dan mengundang penceramah Ust Sihabuddin SIKom MIKom.

Dekan Fisipol UMW Dr AS Martadani Noor MA, mengatakan syawalan halal bihalal ini menjadi upaya untuk mempererat solidaritas dan soliditas dalam keberagaman adat, RAS, suku dan adat.

"Syawalan kita maknai sebagai bagian dari mensucikan diri. Dalam hubungan dengan sesama manusia, mensucikan diri kita lakukan dengan cara saling memaafkan dan tidak terlepas dari aspek kesabaran," kata Dekan Fisipol, Martadani Noor, Kamis (20/5).

Disebutkan, sabar juga disandingkan dengan salat, batu ujian, jalan keluar dan cara untuk meningkatkan keimanan ketakwaan. Sabar merupakan pengakuan kita sebagai makhluk yang tidak memiliki eksistensi makna apapun dihadapan kekuasaan dan kehendak Allah SWT. "Sabar akan membakar kesombongan dan keangkuhan. Disisi lain, sabar juga mengandung makna berharap lebih baik pada masa akan datang," katanya.

Sedangkan Wakil Rektor I UWM Dr Jumadi SE MM menuturkan, dua tahun pandemi Covid-19 menjadi refleksi bagi semua pihak tentang reputasi seseorang semakin baik atau sebaliknya. Perubahan saat ini harus dipahami apakah perubahan karena berharap adanya imbalan, faktor lingkungan atau kesadaran pribadi.

"Setiap orang pasti memiliki kelemahan dan kekuatan. Covid-19 jangan dijadikan alasan untuk tidak meningkatkan kualitas diri, kita harus tetap bersyukur agar Allah SWT senantiasa menambahkan keberkahan," kata Jumadi.

Sementara Ust Sihabuddin menerangkan syawalan di tengah pandemi Covid-19 ini justru bisa menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi diri menjadi insan yang bereputasi. Dalam upaya mewujudkannya, arus memiliki empati yang tinggi terhadap suasana dan kepada sesama.

"Seseorang yang berempati dibuktikan dengan komunikasi yang baik. Untuk menjadi insan bereputasi kita harus amanah. Kejujuran menjadi hal utama dalam menjalankan amanah tersebut. Tentu saja diimplementasikan dengan sikap amanah ketika kita mendapatkan posisi atau jabatan disebuah lembaga seperti perguruan tinggi," tegas Ust Sihabuddin. **(Mus)-f**

TIAP PERSONEL DIBEKALI KEMAMPUAN DASAR

Damkar Kota Yogya Turut Layani Penyelamatan

YOGYA (KR) - Tim pemadam kebakaran (damkar) Kota Yogya kini turut melayani berbagai upaya penyelamatan yang mengancam keselamatan jiwa manusia maupun hewan. Hal ini seiring perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Ketugasan tim damkar tersebut juga sudah diatur kewenangannya melalui Perda 1/2018 dan Perwal 67/2020. "Ketugasan tersebut masih kami sosialisasikan ke masyarakat. Maka nya di setiap regu dilengkapi dengan personel yang memiliki kemampuan penyelamatan. Namun saat ini kami menekankan agar seluruh personel pemadam kebakaran pun memiliki keterampilan dasar untuk melakukan penyelamatan," jelas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogya Octo Noor Arafat, Jumat (21/5).

Menurutnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogya justru menerima lebih banyak permohonan untuk melakukan berbagai penyelamatan sepanjang 2021. Hal ini karena saat ini tidak terlalu banyak terjadi kasus kebakaran. Sedangkan upaya penyelamatan yang paling banyak adalah permohonan evakuasi sarang tawon disusul evakuasi ular.

Octo menyebut, guna mendukung fungsi penyelamatan maka pihaknya sudah memberikan fasilitas berupa pakaian khusus bagi personel saat akan melakukan evakuasi sarang tawon. "Ini untuk mendukung keselamatan dan personel pun akan merasa lebih percaya diri saat melakukan penanganan sarang tawon. Jika tidak ditangani dengan baik, maka tawon ini cukup berbahaya. Di beberapa daerah sempat terjadi kasus kematian akibat sengatan tawon," katanya.

Kegiatan penyelamatan yang dilakukan oleh regu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak terbatas pada penanganan hewan berbahaya, tetapi juga membantu penanganan kecelakaan lalu lintas. Beberapa kali pihaknya membantu menangani mobil yang mengalami kecelakaan sehingga terbalik. Lokasi penyelamatan juga tidak sebatas di area Kota Yogya melainkan juga di kabupaten lain sesuai laporan yang diterimanya. Namun sebelum meluncur ke lokasi tetap saling dikoordinasikan dengan pengampu wilayah. **(Dhi)-f**

P E N G U M U M A N
(Tentang Sertipikat Hilang)

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis & No.Hak	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Desa / Kel. Kecamatan	No. Pengumunan
1	2	3	4	5	6	7
1	**JASRO**	HM. 123 Luas :1.174 m^2	**JASRO MANGUN DIHARJO**	27-06-2008	PETUGURAN PUNGGELAN	13/2021
2	**ATMINAH**	HM. 28 Luas: 4.150 m^2	**SANURI**	04-03-1965	PETAMBAKAN MADUKARA	14/2021

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang otentik. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan pengganti sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Banjarnegara, 19 Mei 2021
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
Ttd
A. YANI, SH
NIP : 196708091994031005